

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan<sup>1</sup>.

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasanya juga disebut, bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut<sup>2</sup>.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002, hal 9

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010, hal 3

mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi : 1) Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang. 2) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Keberadaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional. Pembangunan identik dengan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya pembangunan merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan menyebabkan perubahan bertahap yang meliputi seluruh aspek kehidupan menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat, terutama sektor swasta dalam kaitannya dengan program pembangunan sarana dan prasarana umum.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna

ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa menurut penulis perlu dicermati lebih lanjut dari sisi aspek hukumnya. Karena pengadaan barang dan jasa selama ini hanya dipandang seakan- akan formalitas belaka dalam suatu pelaksanaan proyek pengadaan, padahal perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

CV. Bangkit merupakan salah satu penyedia jasa yang sudah beberapa kali melaksanakan kontrak konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pekerjaan Pembangunan merupakan salah satu contoh pekerjaan yang telah diserahkan oleh DPU kepada CV. Bangkit melalui penunjukan langsung. Sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut, tentunya ada beberapa hal yang paling mendasar dan terpenting dalam merumuskan tujuan para pihak dalam suatu proyek konstruksi ialah dengan dibuatnya perjanjian. Para pihak yang telah sepakat untuk mengerjakan suatu proyek biasanya akan membuat suatu perjanjian atau biasa disebut dengan kontrak konstruksi.

Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum perjanjian menyebutkan bahwa kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau persetujuan yang tertulis<sup>3</sup>.

Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu

---

<sup>3</sup> R.Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2008, hal.1.

negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis.

Berdasarkan urian di atas, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul : ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA CV. BANGKIT DENGAN DINAS PU KABUPATEN MADIUN.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV. Bangkit dengan Dinas PU Kabupaten Madiun?
2. Bagaimanakah tanggung jawab CV. Bangkit Madiun sebagai kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa jika terjadi wanprestasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV. Bangkit dengan Dinas PU Kabupaten Madiun
2. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab CV. Bangkit Madiun sebagai kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa jika terjadi wanprestasi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas pemahaman keilmuan mengenai hukum perjanjian.
  - b. Sebagai tambahan bahan referensi atau sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Mengetahui keberagaman sistem hukum perjanjian di Indonesia.
  - b. Memberikan informasi mengenai hukum perjanjian tentang pengadaan barang dan jasa khususnya yang terjadi antara CV. Bangkit dengan Dinas PU Kabupaten Madiun
  - c. Sebagai bahan kajian dan kritik serta saran bagi peneliti dalam rangka menambah pengetahuan khususnya tentang hukum perjanjian.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV. Bangkit dengan Dinas PU Kabupaten Madiun yang dikorelasikan dengan bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan tetap mengedepankan pembahasan secara

yuridis dimana sebelum melakukan pembahasan, penulis berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisis akan gejala hukum yang timbul, kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut ditindaklanjuti dengan konsep pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **2. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini lokasi yang dipilih adalah CV. Bangkit Madiun, Jl. Punden No. 32 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan Dinas PU Kabupaten Madiun. Adapun dasar pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan kontrak pembuatan bangunan antara Kepala Dinas PU Kabupaten Madiun dengan kontraktor pengerjaan proyek tersebut, yakni direktur CV. Bangkit Madin. Dalam hal ini perlu dilihat tentang pelaksanaan kontrak tersebut. Dimana pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak hanya sampai selesai, tetapi juga harus dilihat kualitas dan ketahanannya, hal inilah yang menjadi tanggung jawab dari pihak kedua, yang sering dilalaikan atau tidak diperhatikan di lapangan.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan di CV. Bangkit dan Dinas PU Kabupaten Madiun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu mengumpulkan



data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang disusun teliti terkait dengan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik itu dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa, dokumen-dokumen, buku-buku literatur, jurnal, artikel, maupun sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan) dimana penulis memilih anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi dan mengarah pada sentralisasi permasalahan.

Matode pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu:

a. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi ataupun data-data yang berkaitan dengan penelitian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu perjanjian pengadaan barang dan jasa. Wawancara ini dilakukan secara *purposive sampling* untuk

mengambil data tentang pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV Bangkit dan Dinas PU Kabupaten Madiun. Wawancara dilakukan dengan Direktur CV. Bangkit dan Kepala Dinas PU Kabupaten Madiun.

c. Dokumentasi

Mempelajari dokumen ini terkait dengan pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan tujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Data yang dimaksud adalah data tentang pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisa data yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yang selanjutnya diambil kesimpulan yang relevan sehingga mendapatkan data yang akurat, dengan demikian untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di CV. Bangkit Madiun, kemudian faktor apa yang menghambat dan mendukung pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di CV. Bangkit Madiun.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan terdiri dari 4 Bab, yakni :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar atau alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II penulis menguraikan mengenai kajian pustaka dan teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan.

**Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian dari permasalahan yang muncul, dalam hal ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas perumusan masalah yang diungkapkan.

**Bab IV : PENUTUP**

Dalam Bab IV berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh peneliti.

